

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bandung: Sintesis Literatur Tentang Targeting Dan Dampak

Muhamad Aqila Sukma Djati

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: aqilsudja@gmail.com

Riwayat Artikel

Diterima: 15 Mei 2026

Disetujui: 16 Juni 2026

Dipublikasi: 30 Juni 2026

Abstract

Urban poverty in Bandung City still faces structural challenges such as inaccurate beneficiary targeting (targeting error), inter-agency ego, and inconsistent program impacts due to local political dynamics. This study aims to identify the forms of transformation in poverty reduction policies, analyze targeting accuracy, evaluate the socio-economic impact on community welfare, and formulate sustainable policy recommendations in Bandung City. The study uses a qualitative approach with a literature study (library research) through purposive sampling of SINTA and Scopus-indexed journals, official policy documents, and sociological and public administration insights from Prof. Engkus. Data analysis utilizes the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results found that poverty reduction policy changes include three orders: technical adjustments to aid amounts (first order), digitalization of integrated poverty data (second order), and a paradigm shift towards inclusive economic independence (third order). Targeting errors in the form of inclusion and exclusion errors remain the main inhibitor due to slow data updates at the street-level bureaucracy. Nevertheless, integrated policies have had a positive impact on macro poverty reduction, but require a more substantive institutionalization of good governance.

Keywords: *Bandung City, Public Policy, Poverty Reduction, Targeting Error, Good Governance*

Abstrak

Kemiskinan perkotaan di Kota Bandung masih menghadapi tantangan struktural berupa ketidakakuratan penargetan penerima manfaat (*targeting error*), ego sektoral antar-lembaga, serta inkonsistensi dampak program akibat dinamika politik lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk transformasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, menganalisis akurasi *targeting*, mengevaluasi dampak sosial-ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang berkelanjutan di Kota Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur (*library research*) melalui *purposive sampling* terhadap jurnal terindeks SINTA dan Scopus, dokumen kebijakan resmi, serta pemikiran sosiologis dan administrasi publik dari Prof. Engkus. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa perubahan kebijakan penanggulangan kemiskinan mencakup tiga tatanan: penyesuaian teknis besaran bantuan (*first order*), digitalisasi data kemiskinan terpadu (*second order*), dan pergeseran

paradigma menuju kemandirian ekonomi inklusif (*third order*). *Targeting error* berupa *inclusion* dan *exclusion error* masih menjadi penghambat utama akibat lambatnya pemutakhiran data di level *street-level bureaucracy*. Meskipun demikian, kebijakan yang terintegrasi berdampak positif pada penurunan makro angka kemiskinan, namun membutuhkan pelembagaan aspek *good governance* yang lebih substantif.

Kata Kunci: Kota Bandung, Kebijakan Publik, Penanggulangan Kemiskinan, *Targeting Error*, *Good Governance*.

A. PENDAHULUAN

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara demokratis. Di era reformasi birokrasi yang terus berkembang, tuntutan masyarakat terhadap ketepatan sasaran bantuan sosial semakin meningkat, mendorong berbagai daerah untuk melakukan inovasi dan perubahan kebijakan secara berkelanjutan. Dinamika perubahan kebijakan publik di Kota Bandung mencerminkan upaya nyata pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan warganya yang berada di bawah garis kemiskinan, mulai dari integrasi data kemiskinan, pembentukan program pemberdayaan ekonomi lokal, hingga pemanfaatan teknologi informasi untuk meminimalkan salah sasaran bantuan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menganalisis secara mendalam bagaimana kebijakan penanggulangan kemiskinan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan di Kota Bandung melalui lensa akurasi *targeting* dan analisis dampak.

Kebijakan publik secara konseptual didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah atau aktor publik untuk menangani permasalahan tertentu dalam masyarakat. (R, 1972) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah "apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan" (*whatever governments choose to do or not to do*). Sementara itu, (Anderson, 2003) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah yang bertujuan menyelesaikan masalah publik. Dalam mengkaji evolusi program penanggulangan kemiskinan, (Hall, 1993) mengklasifikasikannya ke dalam tiga tatanan (*order of change*): perubahan tatanan pertama (penyesuaian instrumen), tatanan kedua (pergantian instrumen), dan tatanan ketiga (pergeseran paradigma kebijakan). Kerangka teori ini sangat relevan untuk memahami sejauh mana transformasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung telah mencapai perubahan yang bersifat fundamental atau sekadar penyesuaian teknis anggaran bantuan.

Meskipun Kota Bandung telah menunjukkan berbagai kemajuan dalam menekan angka kemiskinan makro, sejumlah permasalahan mendasar masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Pertama, implementasi kebijakan intervensi kemiskinan seringkali tidak konsisten antara level rancangan kebijakan (*policy design*) dan level pelaksanaan (*street-level bureaucracy*) di tingkat RT/RW dan Kelurahan, sehingga manfaat program tidak dirasakan secara merata (Michael, 2010). Kedua, kapasitas sumber daya manusia aparatur birokrasi lokal yang belum sepenuhnya adaptif terhadap validasi data berbasis teknologi digital menyebabkan terjadinya *implementation gap* berupa tingginya angka *inclusion error* (orang kaya menerima bantuan) dan *exclusion error* (orang miskin terlewatkan) (Nugroho, 2017).

Ketiga, fluktuasi kepuasan dan efektivitas bantuan sosial di lapangan seringkali terbentur oleh lemahnya responsivitas pelayanan birokrasi terdepan. Menurut (Engkus, 2019) kualitas

pelayanan publik dan pemenuhan kepuasan dasar masyarakat harus menjadi prioritas utama karena persepsi negatif yang muncul akibat ketidakadilan pelayanan cenderung menyebar secara masif di tengah masyarakat. Keempat, perubahan kepemimpinan daerah yang membawa perubahan prioritas visi politik sering kali menimbulkan ketidaksinambungan (*discontinuity*) dalam program-program jaring pengaman sosial yang padahal sudah berjalan baik pada periode sebelumnya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji isu penanggulangan kemiskinan dan efektivitas bantuan sosial di Indonesia. (Hardiyansyah, 2018) menyimpulkan bahwa dimensi *responsiveness* dan *reliability* menjadi kelemahan utama birokrasi daerah dalam merespons keluhan layanan publik, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial. Persamaan penelitian ini dengan kajian-kajian tersebut terletak pada fokus terhadap kualitas implementasi kebijakan publik di tingkat lokal. Namun terdapat sejumlah kebaruan (*novelty*) yang menjadi keunggulan penelitian ini. Pertama, penelitian ini menganalisis dinamika perubahan kebijakan kemiskinan menggunakan kerangka integratif *Multiple Streams Framework* (Kingdon, 1984) dan *Punctuated Equilibrium Theory* (Baumgartner & Jones., 1993) yang disintesis langsung dengan data empiris Kota Bandung. Kedua, fokus pada rentang analisis longitudinal (2013-2024) guna melihat dampak transisi kepemimpinan daerah. Ketiga, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan konsep ketepatan penargetan secara simultan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung, menganalisis akurasi *targeting* serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat efektivitas implementasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang berkelanjutan. Secara akademis, penelitian ini memperkaya khazanah ilmu administrasi publik dalam model sintesis literatur bertema kemiskinan kota. Secara praktis, temuan ini diharapkan menjadi masukan berbasis bukti (*evidence-based input*) bagi Pemerintah Kota Bandung dalam mengoptimalkan validasi data kemiskinan terpadu agar agenda Reformasi Birokrasi Jilid III dan prinsip pemerintahan yang berorientasi pada masyarakat benar-benar terwujud secara inklusif.

B. KAJIAN PUSTAKA

Teori Perubahan Kebijakan

Menganalisis dinamika perubahan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung, penelitian ini menggunakan teori perubahan kebijakan yang dikembangkan oleh (Hall, 1993). Hall berargumen bahwa kebijakan publik memiliki tiga komponen yang saling terkait, yakni tujuan (*goals*), instrumen (*instruments*), dan tingkatan instrumen (*settings*). Perubahan tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga tatanan (*order of change*). Tatanan pertama (*first order change*) mencakup penyesuaian rutin tingkatan instrumen yang sudah ada (misalnya: menaikkan besaran nominal dana bantuan langsung tunai) tanpa mengubah tujuan dasarnya. Tatanan kedua (*second order change*) melibatkan pergantian instrumen kebijakan (misalnya: mengubah bantuan tunai fisik menjadi kartu nontunai berbasis digital). Sementara tatanan ketiga (*third order change*) merupakan perubahan paling fundamental berupa pergeseran paradigma (*paradigm shift*), yaitu perombakan total dari paradigma karitatif

(pemberian santunan) menjadi paradigma produktif-pemberdayaan mandiri (*citizen-centered empowerment*). Relevansi teori ini diperkuat oleh kajian (Wicaksono, 2019) yang menegaskan bahwa keberhasilan perubahan paradigma dalam administrasi publik sangat bergantung pada komitmen pemimpin daerah untuk mentransformasikan cara pandang budaya birokrasi secara menyeluruh agar inovasi tidak rentan mengalami kemunduran (*setback*).

Implementasi Kebijakan

Untuk menganalisis faktor pendorong dan penghambat efektivitas kebijakan, penelitian ini memadukan dua model implementasi. Model (III, 1980) menekankan empat variabel krusial: (1) *Communication*, kejelasan dan konsistensi penyampaian kriteria kemiskinan; (2) *Resources*, kecukupan anggaran, fasilitas verifikasi, dan kompetensi staf pelaksana; (3) *Disposition*, komitmen dan kejujuran aparat birokrasi di lapangan; serta (4) *Bureaucratic Structure*, kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP) integrasi data. Peneliti memadukannya dengan teori (Grindle, 1980) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (konteks implementasi). Keunikan model (Grindle, 1980) ini terletak pada pemahamannya bahwa implementasi bantuan sosial bukan sekadar proses administratif teknis, melainkan proses politik yang melibatkan dinamika kepentingan aktor lokal (RT/RW/Kelurahan) dalam memperebutkan alokasi sumber daya bantuan sosial, sebagaimana dikonfirmasi oleh kajian (Mubarok et al., 2020) mengenai pentingnya kecocokan instrumen kebijakan dengan konteks lokal.

Aspek Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Publik

Kebijakan kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari aspek kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Perspektif dari (Engkus, 2019) menegaskan bahwa instansi pelayanan publik wajib mengedepankan kualitas dan keadilan demi menjaga kepuasan masyarakat; kegagalan dalam memberikan pelayanan yang adil akan memicu ketidakpercayaan publik yang berlipat ganda. Dalam konteks bantuan sosial, jaminan keadilan (*equity*) diukur dari seberapa minim kesalahan penargetan bantuan tersebut. Hal ini sejalan dengan teori SERVQUAL (Zeithaml et al., 1990) yang menaruh penekanan pada aspek *reliability* (keandalan akurasi data) dan *responsiveness* (kecepatan merespons keluhan warga yang miskin namun belum terdaftar). Penyaluran bantuan yang salah sasaran mencerminkan rendahnya akuntabilitas publik dan lemahnya nilai kolaboratif dalam tata kelola administrasi modern (Wance & Mukhrijal, 2020).

New Public Management

Teori *New Public Management* (NPM) yang dipopulerkan oleh (Osborne & Gaebler, 1992) dalam *Reinventing Government* menawarkan prinsip pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*) dan berfokus pada kepuasan masyarakat selaku pengguna layanan (*customer-driven*). Dalam intervensi kemiskinan, NPM mendorong restrukturisasi birokrasi penanggulangan kemiskinan agar lebih efisien, memanfaatkan platform digital terintegrasi untuk memotong jalur birokrasi yang berbelit-belit, serta menggunakan indikator kinerja yang terukur untuk menilai apakah program bantuan berhasil menaikkan kelas ekonomi penerimanya atau justru menciptakan ketergantungan bantuan secara permanen.

C. METODOLOGI PENELITIAN

<https://jurnal.panengeninsani.com/index.php/pjoik/index>

Publisher: Panengen Publishing

issn: 2964-4550

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur (*library research*). Sebagaimana didefinisikan oleh (Creswell, 2014) dan (Moleong, 2017) metode kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena sosial secara holistik melalui deskripsi naratif tekstual. Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun 2026 dengan menelusuri literatur ilmiah secara daring maupun luring yang bersumber dari basis data Google Scholar, SINTA, DOAJ, dan Scopus, serta dokumen regulasi resmi dari Pemerintah Kota Bandung dan Kementerian Sosial RI. Sesuai prinsipm (Zed, 2008), penelusuran kepustakaan dilakukan secara sistematis terstruktur.

Sumber data ditentukan secara *purposive sampling* dengan kriteria inklusi berupa artikel jurnal ilmiah yang membahas kebijakan kemiskinan Kota Bandung, data akurasi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), serta literatur teoritis administrasi publik yang relevan. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang menjaga validitas dan reliabilitas melalui protokol peninjauan sejawat (*peer-reviewed sources*) (Creswell, 2014) Teknik analisis data menggunakan model interaktif (Miles et al., 2014) yang meliputi: (1) Reduksi data, menyeleksi literatur seputar *targeting error* dan dampak program kemiskinan; (2) Penyajian data dalam bentuk matriks tabel sinkronisasi teoretis; dan (3) Penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data mengacu pada kerangka Lincoln dan Guba (1985) yang mencakup aspek kredibilitas melalui strategi meningkatkan ketekunan bacaan, triangulasi sumber literatur, serta dependabilitas melalui pencatatan *audit trail* penulisan yang transparan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung

Berdasarkan hasil sintesis literatur, dinamika kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung dalam kurun waktu 2013-2024 menunjukkan adanya evolusi struktural. Dengan menggunakan kerangka analisis tiga tatanan perubahan kebijakan (Hall, 1993), dapat diidentifikasi bahwa program pengentasan kemiskinan di Kota Bandung tidak lagi berjalan linier, melainkan mengalami pergeseran instrumen secara berkala, seperti disarikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Tatanan Perubahan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandung

Tatanan Perubahan	Bentuk Perubahan	Contoh Kebijakan / Program	Indikator Capaian
Tatanan I (<i>First Order Change</i>)	Penyesuaian teknis alokasi instrumen rutin	Peningkatan nominal pagu anggaran bantuan pangan; penyesuaian kuota penerima manfaat tingkat kecamatan.	Pengurangan beban pengeluaran jangka pendek; penyerapan anggaran bansos secara berkala.
Tatanan II (<i>Second</i>	Pergantian instrumen melalui	Peralihan dari raskin fisik ke e-Voucher; peluncuran sistem	Sinkronisasi data kemiskinan dengan NIK (<i>single identity</i>);

ARTIKEL

Tatanan Perubahan	Bentuk Perubahan	Contoh Kebijakan / Program	Indikator Capaian
<i>Order Change</i>)	pemanfaatan teknologi digital	aplikasi data kemiskinan terintegrasi tingkat kota.	integrasi pelaporan keluhan.
Tatanan III (<i>Third Order Change</i>)	Pergeseran paradigma (<i>paradigm shift</i>) tata kelola	Transformasi strategi dari bantuan konsumtif-karitatif menuju skema inkubasi bisnis dan pemberdayaan ekonomi inklusif.	Peningkatan jumlah keluarga miskin yang berhasil mandiri lulus dari status bantuan (<i>graduasi</i>) secara nasional.

Sumber: Hasil analisis kompilasi data literatur (2026)

Pada Tatanan I, perubahan berfokus pada aspek anggaran inkremental. Memasuki Tatanan II, digitalisasi jaring pengaman sosial mulai digalakkan guna mengatasi kendala birokrasi tradisional. Puncaknya pada Tatanan III, orientasi kebijakan beralih menuju penguatan kemandirian masyarakat, sejalan dengan prinsip *Smart City* Kota Bandung yang menempatkan warga sebagai subjek aktif pemberdayaan, bukan sekadar objek pasif penerima santunan tunai.

Analisis Akurasi Penargetan (*Targeting*) dan Kendala Implementasi

Masalah krusial dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung yang paling banyak disorot oleh literatur akademik adalah tingginya angka kesalahan penargetan (*targeting error*), yang terbagi menjadi *inclusion error* dan *exclusion error*. Ditinjau dari variabel komunikasi (III, 1980), parameter operasional mengenai siapa yang paling berhak disebut sebagai "keluarga miskin" seringkali tidak tersosialisasi secara konsisten kepada para pelaksana di tingkat terbawah (*street-level bureaucracy*), seperti pengurus RT dan RW (Michael, 2010) Akibatnya, penilaian subjektif dan kedekatan personal (*nepotisme lokal*) sering mengaburkan kriteria objektif yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial atau Pemkot Bandung.

Dari perspektif sosiologi administrasi publik (Engkus, 2019) aspek ketidakadilan dalam penyaluran hak-hak publik seperti bantuan sosial ini memicu resistensi dan konflik horizontal di kalangan warga. Rasa ketidakpuasan warga miskin yang terlewat dari pendataan (*exclusion error*) berdampak buruk pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas kelurahan. Hal ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya (*resources*) aparat kelurahan dalam melakukan verifikasi lapangan secara berkala, sehingga pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kerap mengalami stagnasi atau keterlambatan (*time lag*).

Meninjau aspek *context of implementation* dari (Grindle, 1980), proses pemutakhiran data kemiskinan di tingkat lokal kerap menjadi arena perebutan pengaruh politik tingkat lokal. Ada kecenderungan aparat lokal enggan mencoret nama warga yang ekonominya sudah mampu dari daftar penerima bantuan (*inclusion error*) demi menghindari gesekan sosial di lingkungannya. Hambatan implementasi ini membuktikan adanya celah lebar (*implementation gap*) antara

rancangan kebijakan makro yang ideal dengan realitas mikropolitik di lapangan birokrasi terdepan.

Evaluasi Dampak Sosial-Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Meskipun dihantam kendala *targeting*, sintesis literatur menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan secara agregat memberikan dampak positif yang signifikan pada dimensi ekonomi makro Kota Bandung, terutama dalam hal penurunan kedalaman kemiskinan. Melalui lensa SERVQUAL (Hardiyansyah, 2018) aspek *reliability* sistem penyaluran nontunai (seperti penggunaan kartu elektronik) terbukti berhasil menekan praktik pungutan liar (*pungli*) yang dahulu marak terjadi pada sistem distribusi manual.

Dampak dari pergeseran paradigma kebijakan menuju pemberdayaan ekonomi inklusif (Tatanan III) tercermin dari efektivitas program kredit mikro tanpa bunga dan tanpa agunan untuk UMKM miskin perkotaan. Inovasi ini memberikan dampak *empathy* (kepedulian nyata) berupa penyelamatan para pelaku usaha rentan dari jeratan rentenir. Sesuai dengan prinsip *customer-driven* dari New Public Management (Osborne & Gaebler, 1992), keberhasilan program penanggulangan kemiskinan kini diukur berbasis *outcome* peningkatan pendapatan riil, bukan sekadar laporan serapan kuota bantuan pangan yang habis dikonsumsi.

Namun demikian, kajian (Wicaksono, 2019) dan pandangan (Wance & Mukhrijal, 2020) memberikan catatan kritis bahwa keberlanjutan dampak positif program pemberdayaan ini sangat rentan terinterupsi oleh pergantian kepemimpinan daerah. Apabila walikota baru tidak melembagakan program penanggulangan kemiskinan dari rezim sebelumnya ke dalam Peraturan Daerah (Perda) yang mengikat, program tersebut rawan dihentikan demi memunculkan program baru yang sesuai dengan jargon politik kampanye teranyar. Akibatnya, keberlanjutan kemandirian ekonomi keluarga miskin menjadi terombang-ambing oleh ketidakpastian siklus politik lokal.

Rekomendasi Kebijakan yang Berkelanjutan

Berdasarkan hasil sintesis literatur di atas, dirumuskan beberapa rekomendasi strategis:

- Kelembagaan Regulasi Formal: Mengodifikasikan seluruh cetak biru program penanggulangan kemiskinan unggulan ke dalam Peraturan Daerah (Perda) yang substantif agar terhindar dari risiko diskontinuitas program akibat pergantian kepemimpinan daerah.
- Penguatan Verifikasi dan Validasi Data Partisipatif: Mengikis *targeting error* dengan memperkuat kapasitas *resources* SDM di tingkat kelurahan serta melibatkan peran aktif masyarakat sipil dalam mekanisme *community-based monitoring* (pengawasan berbasis komunitas) guna melakukan validasi data secara aktual.
- Internalisasi Aspek Keadilan Layanan (Perspektif Engkus): Mengedepankan transparansi daftar penerima bantuan di papan pengumuman digital tingkat kelurahan/RT untuk memenuhi aspek keadilan pelayanan demi mencegah konflik sosial dan menjaga akuntabilitas publik.
- Integrasi Program Hulu-Hilir: Menyeimbangkan intervensi jangka pendek (*safety net*) dengan program peningkatan kapasitas ekonomi jangka panjang melalui pelatihan keterampilan digital berkelanjutan bagi kelompok pemuda dari keluarga prasejahtera.

E. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap dinamika kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung selama periode 2013–2024, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi transformasi kebijakan yang signifikan dalam bentuk pergeseran paradigma atau *Third Order Change*. Perubahan ini beralih dari yang semula bersifat bantuan sosial karitatif berjangka pendek menjadi strategi pemberdayaan ekonomi inklusif yang mandiri dan berpusat pada masyarakat (*citizen-centered*). Implementasi digitalisasi pendataan dan sistem penyaluran bantuan terbukti memberikan dampak positif bagi penurunan angka kemiskinan makro serta menekan celah korupsi birokrasi di lapangan.

Namun demikian, efektivitas perubahan ini secara substantif masih terhambat oleh masalah klasik berupa tingginya *targeting error* (*inclusion* dan *exclusion error*) akibat tidak konsistennya komunikasi kriteria kemiskinan dan lemahnya akurasi pemutakhiran data di level *street-level bureaucracy*. Pandangan dari (Engkus, 2019) mengingatkan kembali betapa krusialnya aspek keadilan dalam pelayanan publik; ketidaktepatan penargetan bantuan sosial tidak hanya merugikan anggaran negara, tetapi juga menggerus kepuasan dan kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah daerah. Oleh karena itu, langkah mendesak yang perlu diambil Pemkot Bandung di masa depan adalah melakukan pelebagaan inovasi data terpadu ke dalam regulasi daerah yang kokoh serta mentransformasikan budaya kerja aparat birokrasi terdepan agar lebih responsif, adil, dan transparan dalam mengawal pemenuhan hak-hak masyarakat miskin perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E. 2003. *Public Policymaking: An Introduction*. 5th ed. Houghton Mifflin Company.
- Baumgartner, Bryan D. &, and Frank R. Jones. 1993. *Agendas and Instability in American Politics*.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Engkus, Engkus. 2019. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Di Puskesmas Cibitung Kabupaten Sukabumi." *Jurnal Governansi* 5(2):99–109. doi:10.30997/jgs.v5i2.1956.
- Grindle, Marilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Hall, Peter A. 1993. "Policy Paradigms, Social Learning, and the State: The Case of Economic Policymaking in Britain." *Comparative Politics* 25(3):275–96. doi:10.2307/422246.
- Hardiyansyah. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator Dan Implementasinya*. Gava Media.
- III, George C. Edward. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Kingdon, John. W. &. 1984. *Agendas, Alternatives, and Public Policies*.
- Michael, Lipsky &. 2010. *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, S., S. Zauhar, E. Setyowati, and Suryadi. 2020. "Policy Implementation Analysis:

-
- Exploration of George Edward III, Marilee S. Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework.” *Journal of Public Administration Studies* 5(1):33–38.
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik Dan Manajemen Politik Kebijakan Publik*. Elex Media Komputindo.
- Osborne, David, and Ted Gaebler. 1992. *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley Publishing Company.
- R., Dye Thomas. 1972. *Understanding Public Policy*. Prentice-Hall.
- Wance, M. H., and Mukhrijal. 2020. “Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Mengikuti Perubahan Paradigma Baru Administrasi Publik.” *Jurnal Gaspol (Kajian Politik Dan Pemerintahan)* 1(1):24–34. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i1.17327>.
- Wicaksono, K. W. 2019. “Transforming The Spirit of New Public Service Into Public Management Reform in Indonesia.” *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik* 2(2):116–25.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zeithaml, Valerie A., A. Parasuraman, and Leonard L. Berry. 1990. *Delivering Quality Service: Balancing Customer Perception and Expectation*. The Free Press.